

BAB II

STRATEGI DAYA SAING INDONESIA MENGHADAPI

EKSPANSI PASAR CINA

1.1 Awal Kerjasama Indonesia – Cina dalam Rangka ACFTA (2004 – 2010)

2.1.1 Dinamika Hubungan Ekonomi Indonesia – Cina

Indonesia dan Cina menjadi *nation state* pasca perang dunia ke II namun memiliki perbedaan sistem sosial yang mempengaruhi hubungan ekonomi antara kedua Negara. Selaras dengan pengaruh rezim politik internasional pada masa Perang Dingin, hubungan ekonomi Indonesia dengan Cina selalu naik turun. Harus di akui hubungan ekonomi kedua belah pihak sangat erat berkaitan dengan hubungan politik kedua Negara. Sebagaimana pasang surut hubungan politik begitu pula hubungan ekonomi yang dijalani oleh Indonesia dengan Cina.

Hubungan diplomatik Indonesia dengan Cina dimulai pada tahun 1950 pada masa Moch. Hatta menjadi Perdana Menteri yang ditandai dengan pengakuan secara resmi kedaulatan Cina pada tanggal 15 Januari 1950 dan pengukuhan diplomatik secara resmi pada tanggal 13 April 1950.¹ Pertukaran duta besar antara Indonesia dan Cina menandai mulai eratnya hubungan kedua negara tersebut. Baik Indonesia maupun Cina menyadari pentingnya kedua Negara dalam

¹ Tuty Enoch Muas, "Hubungan Indonesia-Cina: Secara Historis, Dinami!," Dalam Merangkul Cina ed. I Wibowo & Syamsul Hadi, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 2009, H. 26.

menjalin kerjasama baik secara politik maupun ekonomi. Awal hubungan yang terjalin belum memberikan hubungan yang produktif karena situasi dalam negeri Cina dan Indonesia yang sedang disibukkan dengan proses rekonstruksi.

Hubungan bilateral perdagangan Indonesia – Cina ditanda tangani pertama kali pada tahun 1953. Diawal kerjasama, perdagangan kedua Negara hanya mencapai US\$ 7.4juta namun trus meningkat hingga US\$129juta dalam waktu 5 tahun.² Pada tahun 1965, Cina menjadi partner dagang terbesar kedua Indonesia dengan nilai ekspor dan impor mencapai 11% dari nilai total perdagangan Indonesia.³ Pertumbuhan yang baiuk dalam hubungan perdagangan tidak membuat hubungan Cina dan Indonesia secara politik dapat berjalan dengan baik. Dengan isu komunisme Cina turut berperan aktif membantu pertumbuhan PKI yang membuat Indonesia membekulan hubungan diplomatik pada tahun 1967 setelah peristiwa G30S/PKI yang mengakibatkan penghentian hubungan perdagangan. Namun, perdagangan antara Indonesia dan Cina tetap berlangsung melalui jaringan Hongkong dan Singapura yang bernilai hingga US\$ 200 juta pertahun.⁴

Selama fase pembekuan, Cina terus melontarkan strategi – strateginya untuk menormalisasi kembali hubungan diplomatik dengan Indonesia melalui diplomasi dagang. Salah satu keberhasilan diplomasi dengan kehadiran delegasi Kamar Dagang Indonesia (KADIN) yang turut berpartisipasi dalam Pameran

² Chong Bo Wu, "Forging Closer Sino – Indonesia Economic Relation And Policy Suggestion," *Ritsumeikan International Affairs*, 2011, Vol. 10, H. 119-142.

³ Lin Mei, "The Economic Relations Between China And Indonesia And MindLand China's Investment in Indonesia," "Dalam [www.CityU.edu.hk/searc/CSEA.../CSEA.../Linmei\(Eng_Rev\).pdf](http://www.CityU.edu.hk/searc/CSEA.../CSEA.../Linmei(Eng_Rev).pdf) diakses pada 21 April 2016

⁴ Ibid.

Dagang Guangzhou pada bulan November 1977.⁵ Kontak pertama tersebut menjadi jalan untuk merajut kembali hubungan perdagangan Indonesia dan Cina yang tidak terlepas dari besarnya keuntungan yang diperoleh kedua belah pihak. Selang 8 tahun jelang kehadiran KADIN di Guangzhou hubungan Indonesia dengan Cina semakin membaik pada tahun 1985 ketika Pemerintah Indonesia membuka kembali perdagangan langsung bagi komunitas bisnis antar kedua Negara. Hal ini menjadi langkah awal yang sangat penting menuju normalisasi hubungan diplomatik sebagaimana perdagangan bilateral akan terus berkembang dan sangat dibutuhkan Indonesia karena tekanan ekonomi dan keinginan Indonesia untuk berperan lebih besar dalam diplomasi internasional.

Normalisasi semakin cepat terwujud melihat dari sisi Indonesia dimana Presiden pada saat itu Jendral besar Soeharto menginginkan perluasan pasar ekspor non migas Indonesia termasuk ke Cina dan keinginan menjadikan Indonesia sebagai ketua gerakan Non-Blok.⁶ Jelas untuk meraih tujuan tersebut menjalin hubungan diplomatik dengan Cina menjadi penting, lima tahun berselang, tepatnya tahun 1990 hubungan diplomatik Indonesia Cina kembali di buka dengan ditandainya kunjungan resmi Perdana Menteri Cina Li Peng ke Indonesia pada tanggal 6 – 10 Agustus 1990 yang berkaitan dengan Kesepakatan Penyelesaian Kewajiban Hutang Indonesia ke Cina (*Agreement on the Settlement of Indonesia's Debt Obligation to China*) serta penandatanganan naskah mengenai pemulihan hubungan diplomatik (*Communicue on the Resumption of Diplomatic*

⁵ Tuty Enoch Muas, Op.Cit, h. 33.

⁶ Syamsul Hadi, "Hubungan Indonesia-China di Era Pasca-Orde Baru: Perspektif Indonesia," dalam Merangkul Cina ed. I Wibowo & Syamsul Hadi, Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2009. h. 54.

Relations Between People's Republic of China and the Republic of Indonesia) yang kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan naskah persetujuan hubungan kerjasama dalam bidang ekonomi dan perdagangan antara Indonesia dengan Cina.⁷ Salah satu persetujuan kerjasama terkait dengan penandatanganan *memorandum of understanding* untuk pembentukan hubungan perdagangan antar kedua Negara oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) dan Dewan Promosi Perdagangan Internasional Cina, *China Council for the promotion of international trade* (CCPIT).⁸

Dengan kembali normalnya hubungan diplomatik Indonesia dengan Cina begitupula dengan hubungan perdagangan kedua Negara di awal tahun 1980 an ekspor Indonesia ke Cina hanya 8 juta dollar Amerika jauh lebih rendah dari pada ekspor Indonesia pada Negara lainnya seperti Malaysia, Thailand, ataupun Filipina dengan awal yang tidak terlalu baik, namun tren perdagangan terus meningkat dengan cepat sehingga perdagangan dengan Cina merupakan hal yang penting bagi keseimbangan neraca perdagangan Indonesia. Bahkan dengan waktu yang relative singkat, Cina dengan cepat menjadi mitra Indonesia dengan peringkat 5 besar Negara tujuan impor dan ekspor Indonesia.⁹ Cina pun berhasil melampaui Taiwan yang sebelumnya menjadi mitra dagang terbesar kelima Indonesia hingga akhir tahun 80an (setelah Jepang, AS, Singapura dan Korea)

⁷ Nurul Huda & Zulihar, "Perdagangan Bilateral Indonesia-China Periode 2000-2009," Dikta Ekonomi, Desember 2009, Vol.6 no 3, h. 187.

⁸ Indah Retnoningsih, "Perkembangan Kerjasama Bilateral Ekonomi Indonesia dan Cina dari tahun (1967 – 2006) dalam Lingkup Pengaruh ACFTA di Kawasan ASEAN," dalam <http://diplomacy945.blogspot.com/2010/06/perkembangan-kerjasama-bilateral.html>, di akses tgl 21 April 2016

⁹ Imron Husein, "The Emergence of China: Some Economic Challengers to Indonesia," Research paper, di presentasikan pada AT10 *research converence Tokyo*, 3-4 Februari 2004, h.4.

Cina dengan kebijakan yang lebih terbuka dalam perdagangan disertai pula dengan peningkatan industry yang pesat hal ini terlihat dari komunitas ekspor Cina yang dapat berkompetensi dengan produk yang sama dari Negara lain dalam pasar domestik Indonesia dimana Cina mampu mengakomodasikan kebutuhan memenuhi permintaan dari berbagai kalangan konsumen Indonesia

Tidak dapat dipungkiri hubungan ekonomi merupakan faktor utama dalam pemulihan hubungan Indonesia dengan Cina dengan perdagangan sebagai faktor penting dalam keberlanjutan hubungan kedua Negara. Sejak tahun 80an perdagangan kedua Negara mencapai US\$ 500 juta per tahun namun tahun 2000 mampu mencapai US\$ 7,5 miliar atau dua kali lipat dari jumlah tahun sebelumnya. Tahun 2001, dengan perlambatan ekonomi dunia terjadi nilai penurunan perdagangan antara Cina dengan Indonesia yang hanya mencapai US\$ 6,7 miliar perdagangan tahun 2002 mampu meningkat kembali namun lebih rendah dari tahun 2000 yang menyentuh angka US\$ 7,3 miliar.¹⁰ Cina resmi menjadi partner dagang kelima terbesar Indonesia dan Indonesia berada pada urutan partner ketujuh belas Cina.

Krisis finansial 1997 yang menghantam perekonomian Indonesia tidak disangka membawa hubungan Indonesia dan Cina semakin dekat. Besarnya arus modal yang keluar dan regulasi yang tidak baik serta pengawasan yang rendah dalam sistem perbankan membuat menurunnya perekonomian nasional yang ditandai dengan jatuhnya nilai Rupiah terhadap Dollar Amerika. Pemerintah Indonesia kemudian mengambil tindakan dengan meningkatkan suku bunga

¹⁰ Anthony L. Smith, "From latent Threat to Possible Partner: Indonesia's China Debate", Asia-Pacific Center for security Studies, Desember 2003, h. 5.

secara drastic dan alhasil tingginya inflasi menyebabkan harga kebutuhan pokok melambung tinggi. Tidak hanya itu, banyak perusahaan yang gagal membayar pinjaman mereka terutama yang berdasarkan nilai Dollar Amerika. Hal ini tentu berdampak pada jumlah pemutusan hubungan kerja yang memaksa Presiden Soeharto untuk mengundurkan diri terdesak pula dengan banyaknya demonstrasi mahasiswa pada tahun 1998.

Menghadapi turbulensi ekonomi, Indonesia membutuhkan bantuan untuk memulihkan perekonomiannya. Bantuan IMF yang dianggap mampu mengatasi masalah tersebut ternyata sudah cukup terlambat. Hal ini bertolak belakang dengan Cina yang memberikan bantuan kepada Indonesia dan juga berjanji untuk tidak mendevaluasi nilai mata uang Yuan.¹¹ Selama masa itu, Cina memberikan bantuan ekonomi senilai US\$ 200 juta kepada Indonesia dan Cina ikut berpartisipasi dalam rencana penyelamatan IMF.¹²

Dalam perjalanan perdagangan Indonesia dan Cina pasca normalisasi juga berdampak akibat tantangan krisis Asia tahun 1997 tersebut. Sebelum krisis ekspor Indonesia ke Cina terus meningkat hingga mencapai US\$ 2,7 milyar tahun 1997.¹³ Tidak mengherankan banyak pengusaha memprediksi ekspor Indonesia ke Cina akan mencapai US\$ 4 hingga 5 Milyar dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Namun harapan tersebut terhalang karena krisis finansial yang muncul dipertengahan tahun 1997. Ekspor Indonesia ke Cina selama krisis

¹¹ “Dinamika Pengaruh China dalam Kerjasama Multilateral di Kawasan Asia Timur”, dalam <http://morientalisa.wordpress.com/2012/01/18/dinamika-pengaruh-China-dalam-kerjasama-multilateral-di-kawasan-asia-timur/>. Di akses tgl 21 April 2016

¹² Eduardus, “Working Paper: Amerika Serikat dan Krisis Finansial Asia 97-98”, dalam <http://Coretcoretkuliah.wordpress.com/2011/01/12/working-paper-Amerika-Serikat-dan-krisis-finansial-asia-97-98/> di akses tgl 21 April 2016

¹³ Chongbo Wu, Loc.Cit., h.199

tidaklah menentu. Perlu di cermati pada awal 1998 fokus Pemerintah Indonesia lebih mengarah pada perekonomian dalam hubungan bilateral dengan Cina. Peningkatan perdagangan antara kedua Negara memperlihatkan pola hubungan pasca normalisasi antara Jakarta dan Beijing masih sebatas perdagangan dan investasi khususnya hingga krisis Asia.

Hubungan bilateral dalam ekonomi antara Cina dan Indonesia pada masa Presiden Gusdur terus meningkat terutama dalam perdagangan periode 1999/2000. Menurut data BPS ekspor Cina ke Indonesia tahun 2000 sebesar US\$ 3,06 Milyar, naik sebesar 60% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar US\$ 906 Juta. Untuk tahun 2001 sampai bulan September sebesar US\$ 2,12 Milyar turun 6,19%, dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar US\$ 2,18 Milyar. Neraca perdagangan Indonesia selama ini menunjukkan surplus untuk Indonesia, yang pada tahun 2000 mencapai nilai sebesar US\$ 1,34 Milyar. Dalam tahun 2000, Indonesia merupakan Negara urutan ke 14 sebagai Negara tujuan ekspor Cina, dan urutan ke 13 sebagai Negara sumber Impor Cina.¹⁴

Tabel 2.1
Tabel Ekspor-Impor Indonesia ke China 2000 – 2006 (USD 000)

Year	Petroleum & Natural Gas				Non Petroleum & Natural Gas				Total Volume	
	Exports	%	Imports	%	Exports	%	Imports	%	Exports	Imports
2000	14.367	23.13	6.019	17.96	47.757	76.87	27.495	82.04	62.124	33.515
2001	12.636	22.44	5.472	17.67	43.685	77.56	25490	82.33	56.321	50.962
2002	12.113	21.19	6.526	20.86	45.064	78.81	24.763	79.14	57.159	31.289
2003	13.651	21.83	7.630	23.06	48.876	78.17	25.490	76.94	62.527	33.086
2004	15.645	21.86	11.732	25.22	55.939	78.14	34.792	74.78	71.585	46.525
2005	19.231	22.13	17.457	28.02	66.428	77.87	40.243	71.8	85.660	57.701
2006	21.188	21.04	18.975	31.07	79.502	78.96	42.103	68.93	79.502	61.078

Sumber : Badan Pusat Statistik

¹⁴ Nurul Huda dan Zulihar, Loc.cit., h.188

Walaupun secara diplomatik Indonesia lebih terbuka disbanding Cina baik secara budaya dan anti diskriminasi terhadap kaum Tionghoa, surplus Indonesia pada tahun 2000 mengalami penurunan kembali menjadi US\$ 745 juta bahkan tahun 2001 mengalami penurunan yang sangat signifikan mencapai US\$ 357 juta.¹⁵ Tren penurunan surplus perdagangan dengan Cina akan membahayakan keseimbangan neraca perdagangan Indonesia karena pada saat itu Indonesia tergantung pada surplus perdagangan untuk menjaga posisi neraca perdagangan saat itu.

Perdagangan yang dilakukan Indonesia Cina baik industry migas maupun non migas selama periode 2000 – 2006, Indonesia mengalami surplus perdagangan yang pasang surut. Pada tahun 2003, Indonesia menikmati surplus sebesar US\$ 29,441 ribu tetapi nilai surplus tersebut terus mengalami penurunan hingga tahun 2006 surplus perdagangan Indonesia terhadap Cina sebesar US\$ 18,424 ribu. Impor migas Indonesia dari Cina mengalami kenaikan yang sangat signifikan yaitu dari US\$ 6,019 ribu pada tahun 2000 menjadi US\$ 18,975 ribu pada tahun 2006 yang mengalami kenaikan kurang lebih 300%. Sedangkan untuk impor non migas kondisi sebaliknya terjadi yaitu terjadi penurunan pada periode 2000 – 2002 setelah itu sejak tahun 2003 – 2006 mengalami kenaikan. Perkembangan ekspor non migas selama periode 2000 – 2006 hanya satu periode ekspor Indonesia ke Cina yang mengalami penurunan yaitu tahun 2001 dengan nilai US\$ 43,685 ribu sedangkan sebelumnya tahun 2000 bernilai US\$ 47,757

¹⁵ Imron husein, Loc.cit. h. 3

ribu periode selanjutnya ekspor non migas Indonesia ke Cina terus mengalami peningkatan hingga tahun 2006.¹⁶

Tidak hanya perdagangan yang menjadi target Cina dalam kerjasama dengan Indonesia. Banyak investasi yang ditanam pihak Cina di Indonesia dimana ada sekitar 800 investor Cina yang berinvestasi dengan nilai mencapai US\$ 2 Milyar setara dengan dua kali lipat investasi Indonesia ke Cina.¹⁷ Kebijakan yang berorientasi pada Cina tetap dilakukan Presiden Megawati Soekarno Puteri yang menggantikan Presiden Gusdur pada Juli 2001. Selama kunjungan kenegaraan tahun 2002 ke Cina, Presiden Megawati telah berhasil meningkatkan kerjasama bilateral di semua sektor terutama energi dan pertanian.¹⁸ Upaya Megawati merupakan fitur kunci yang membawa misi penjualan Gas Alam (LNG) ke Provinsi Guangdong Cina yang akhirnya menghasilkan kesepakatan Indonesia mensuplai gas LNG ke Cina, serta terjadi kesepakatan Petro Cina mengakuisisi ladang minyak Devon Energy dan Cina dan *China National Offshore Oil Cooperation* (CNOOC) menguasai beberapa aset minyak dan gas Indonesia.¹⁹ Perdagangan bilateral pada tahun 2002 meningkat hingga US\$ 8 Juta hingga akhir tahun 2003.²⁰ Tahun 2002 merupakan tahun ASEAN dan Cina menandatangani kesepakatan kerjasama perdagangan bebas yang dimulai dengan program *Early Harvest Program* (EHP). Pada masa pelaksanaan tahap awal ACFTA atau EHP.

¹⁶ Nurul Huda & Zulihar. Loc.Cit h.189

¹⁷ Anthony L. Smith, Loc. Cit. h. 5

¹⁸ "China Pledges \$400 M to Indonesia," dari BBC News, dalam <http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/1891007.stm>, March 24, 2002, di akses tgl 21 April 2016

¹⁹ Hadi Soesastro, "China-Indonesia Relations and the Implications for the United States," USINDO Report, November 7, 2003

²⁰ Ibid.

Ekspor Indonesia ke Cina meningkat hingga 232,20% dari tahun 2003 atau sekitar US\$ 12,6 Juta sedangkan impor dari Cina meningkat hanya sebesar 38,67%.²¹

Pada tahun 2004, Indonesia kembali memiliki Presiden baru yaitu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang masih menerapkan kebijakan aktif menjalin kerjasama dengan Cina. Secara keseluruhan total volume perdagangan Indonesia dan Cina pada tahun 2004 terhitung menjadi US\$ 13,47 Milyar atau meningkat sebesar 31,8% dari tahun sebelumnya.²² Total volume perdagangan melonjak hingga US\$ 16,8 Juta pada tahun 2005.²³ Menelaah lebih lanjut pertumbuhan perdagangan dari 2003 tersebut dapat dikatakan terpengaruh akan kerjasama *Early harvest program*, yaitu tahap awal dari kerangka kesepakatan kerjasama ASEAN dan Cina dimana Cina memberikan akses mudah dengan membebaskan atau menurunkan tarif pertanian ASEAN masuk ke Cina.

Indonesia dan Cina menyadari bahwa satu sama lain merupakan mitra ekonomi yang potensial. Dari perspektif Indonesia, penduduk Cina yang mencapai 1,2 Milyar jiwa merupakan potensi ekonomi yang sangat potensial untuk digali lebih dalam. Namun, disisi lain kekhawatiran Pemerintah Indonesia dengan masuknya Cina ke dalam WTO pada tahun 2001 terkait dengan peningkatan daya saing Cina ke pasar dunia yang dapat menjadi pesaing bagi ekspor Indonesia. Meskipun ada peningkatan angka perdagangan, perdagangan bilateral Indonesia – Cina masih relatif kecil. Melihat dari sisi keunggulan komperatif yang dimiliki dapat dikatakan relatif sama sehingga ekonomi

²¹ Daniel Pambudi & Alexander C. Chandra, Loc.cit., Jakarta: Institute for Global Justice, 2006. H.37

²²Ibid

²³“China-Indonesia Agree to Intensify Economic Cooperation”, Xinhua News Agency, dalam <http://english.sina.com/China/1/2006/1006/91073.html>, di akses tgl 21 April 2016.

Indonesia dan Cina tidak bersifat komplementer tetapi cenderung bersaing. Cina sendiri tentu juga melihat faktor populasi yang besar Indonesia sebagai pasar yang potensial bagi ekspor produk mereka namun Cina juga melihat sumber daya alam yang melimpah di Indonesia sebagai kekuatan atau amunisi tambahan untuk mencapai tujuannya menjadi kekuatan dunia melalui jalan damai.²⁴

Berbagai strategi dilancarkan untuk memperkuat hubungan ekonomi antara Indonesia dengan Cina dimana pada tahun 2005, Presiden Cina Hu Jintao mengunjungi Jakarta pada bulan April terkait dengan perayaan hari peringatan Konferensi Asia Afrika ke – 50 di Bandung. Pada pertemuan tersebut, Hu Jintao dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sepakat untuk mengeluarkan satu pernyataan bersama mengenai Pembentukan Kemitraan Strategis antara Cina dan Indonesia. Tidak hanya itu, Cina juga memberikan kesepakatan pinjaman dana sebesar US\$ 300 Juta dalam bentuk kredit pembeli dan dukungan pengajaran bahasa Cina.²⁵ Dalam hubungan ekonomi pun hubungan Cina dan Indonesia semakin membaik, penandatanganan kesepakatan *strategic partnership agreement* diharapkan mampu meningkatkan hubungan Indonesia dan Cina ke level yang lebih tinggi sehingga mampu meningkatkan perdagangan antar ke dua Negara.

Dalam perdagangan komoditas, Indonesia telah merasakan surplus perdagangan dengan Cina namun struktur perdagangan bilateral kini telah

²⁴ Wang Jiang Yu, "Legal and Policy Considerations of China-ASEAN FTA: The Impact on the Multilateral Trading System, dalam H.K Leong dan S.C.Y ku,eds, *China and Southeast Asia: Global Changes and Regional Challenges*," Singapore: Institute of Southeast Asian Studies and Center for Southeast Asian Studies, Sun Yatsen University, 2005. H.53

²⁵ "China and Indonesia Seal Strategic Pact", dalam http://www.nytimes.com/2005/04/25/world/asia/25iht-indonesia.html?_r=1, di akses tgl 21 April 2016

berubah dan hal ini menyebabkan berbagai kekhawatiran. Berbeda dengan ketika hubungan komersil dimulai, kini Indonesia yang hanya mampu mengekspor bahan baku dan produk olahan pertama seperti minyak mentah, bubur kertas, kayu gelondongan, dan minyak sawit. Sementara itu, impor Indonesia dari Cina sekarang merupakan produk olahan atau produk jadi seperti mesin, elektronik, tekstil dan motor. Mau tidak mau harus diakui akan mengancam manufaktur local yang tergerus akan produk impor Cina. Pertumbuhan Cina adalah nyata, disatu sisi mengesankan namun disisi lainnya juga merupakan hal yang menakutkan. Hal ini terlihat dari industri dalam negeri seperti tekstil dan alas kaki yang terus menurun terutama akibat kompetisi dengan produk Cina. Senada dengan industri tekstil dan alas kaki, industri teknologi rendah juga akan mengalami hal serupa.

Komposisi komoditas perdagangan antara Indonesia dan Cina cenderung rapuh bagi Indonesia. Cina ke Indonesia dari *Primary Product* hingga produk berteknologi rendah, menengah hingga tinggi dengan proporsi yang seimbang jumlahnya. Berbicara mengenai komoditas ekspor Indonesia ke Cina tentu tidak terlepas membahas pula impor Indonesia dari negeri berpenduduk terpadat di dunia tersebut. Pasar Indonesia sangat terbuka terhadap berbagai komoditas impor Cina termasuk dalam komoditas yang sama dengan ekspor Indonesia ke Cina.

1.1.2 Kesiapan Indonesia Menghadapi ACFTA

Setelah pemberlakuan ASEAN – *China Free Trade Area*, sebanyak 1.017 pos tarif Cina – Indonesia akan dihapuskan. Dari jumlah itu, 828 pos tarif telah diturunkan pada periode 2004 – 2009 dan 200 pos tarif akan menyusul dihapuskan. Dengan ditandatanganinya ACFTA banyak produksi industri

Indonesia yang merugi, ada sekitar tujuh sektor kemungkinan yang merugi, termasuk baja, elektronika, tekstil dan produksi tekstil (TPT), dan furniture. Potensi kerugian di sektor industri senilai triliunan rupiah terjadi sesaat setelah pemberlakuan ACFTA dan akan dirasakan kalangan industri dalam kuartal pertama 2010. Adapun dampak tak langsung adalah penurunan penjualan produk – produk dalam negeri akibat kalah bersaing dengan produk Cina ataupun Negara lain.

ACFTA merupakan salah satu bentuk kerjasama liberalisasi ekonomi yang banyak dilakukan Indonesia dalam 10 tahun terakhir, sejak ditandatanganinya perjanjian ACFTA pada tahun 2004 merupakan perang mutu harga, kuantitas akan suatu pelayanan barang dan jasa serta pasar global Cina. Harga barang produksi Cina relatif murah dan diminati konsumen Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari kualitas barang yang dihasilkan oleh Cina. Dengan adanya fenomena ini Indonesia perlu mempersiapkan tim yang diharapkan mampu memberi kontribusi positif memperkuat daya saing global. Pemerintah bersama Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia dan Asosiasi Indonesia (APINDO) telah membentuk suatu kerjasama dalam menghadapi ASEAN – *China Free Trade Area* (ACFTA) sebagai bentuk wadah untuk menampung keluhan terhadap ACFTA. Namun, pada kenyataannya hal ini belum cukup membantu dikarenakan masih minimnya daya saing produk Indonesia yang menjadi tombak perekonomian.

Banyak factor yang menentukan rendahnya daya saing. Salah satunya adalah peran dari strategi perdagangan dan industri. Tanpa strategi industri dan

perdagangan, suatu Negara tidak mungkin membangun industri yang kompetitif dan produktif. Apabila dilihat dari daya saing produk industri. Indonesia masih minim dalam menghadapi persaingan, sedikitnya ada 14 sektor usaha yang harus dirundingkan ulang (renegoisasi) untuk penangguhan keikutsertaan dalam implementasi penuh ACFTA 2010.

2.2 Strategi Daya Saing Pemerintah Indonesia

Strategi industrialisasi merupakan strategi yang sangat penting dan juga telah diterapkan sebelumnya oleh Negara, dalam melaksanakan strategi industrialisasi, ada dua pilihan strategi, yaitu strategi industri substitusi impor (ISI) dan Strategi industri promosi ekspor (IPE). SI adalah industri domestik yang membuat barang – barang menggantikan barang impor, sedangkan strategi PE lebih berorientasi ke pasar internasional dalam usaha pengembangan industri dalam negeri. Jadi berbeda dengan strategi SI, dalam strategi PE tidak ada diskriminasi dalam pemberian insentif dan fasilitas – fasilitas kemudahan lainnya dengan pemerintah, baik untuk industri yang berorientasi kepada pasar domestik maupun yang berorientasi ke pasar ekspor.

2.2.1 Strategi Industri Substitusi Impor (ISI)

Pada umumnya Negara berkembang lebih memilih kebijakan ekonomi terbuka, dimana suatu Negara melakukan hubungan ekonomi dengan Negara lain. Kebijakan ini akan membuka akses pasar ekspor bagi produk – produk mereka, sekaligus membuka sumber pengadaan barang modal dan bahan baku industri dari Negara – Negara lain. Secara teoritis, jika pengelolaan ini baik dan transparan,

kebijakan ekonomi terbuka dapat mempercepat pembangunan ekonomi suatu Negara.

Industri Substitusi Impor merupakan kebijakan ekonomi yang banyak diadopsi oleh Negara berkembang, untuk memajukan industri dengan cara melindungi para produsen lokal dari kompetisi barang import. Proteksi dalam bentuk pajak yang tinggi atau pembatasan impor melalui quota digunakan tanpa adanya diskriminasi.²⁶

Strategi pemerintah yang menekankan penggantian beberapa pertanian atau industri impor untuk mendorong produksi lokal untuk konsumsi lokal, daripada memproduksi untuk ekspor pasar. Substitusi Impor dimaksudkan untuk menghasilkan pekerjaan, mengurangi permintaan devisa, menstimulasi inovasi, dan membuat Negara memberikan di daerah kritis seperti makanan, pertahanan, dan teknologi canggih.²⁷

Substitusi impor, pendekatan substitusi pengganti eksternal yang memproduksi barang dan jasa, terutama kebutuhan dasar seperti energi, makanan, dan air, dengan barang produksi lokal. Gagasan substitusi impor mulai populer pada tahun 1950 – 1960 sebagai strategi untuk memajukan kebebasan ekonomi dan mengembangkan ekonomi di Negara berkembang (Bruton 1998). Ekonomi lokal seringkali dideskripsikan sebagai “*Leaky Bucket*” yang merupakan model *bucket* yang mempresentasikan *Local Region* dan *Money* yang masing – masing

²⁶ *Import-Substitution* www.britannica.com/EBChecked/topic/284081 di akses pada tgl 29 maret 2016

²⁷ *Definition Import-Substitution* <http://www.businessdictionary.com/>. Diakses pada tgl 29 maret 2016

memiliki peredaran dalam *bucket*. Istilah *Leaky Bucket* memiliki fokus dalam memastikan bahwa uang secara kontinuitas mengalir dalam *local region*.

Salah satu cara untuk melindungi uang agar tidak *perlop* dalam *local economy* adalah dengan cara menghubungkan *local demand* untuk barang dan jasa dengan supplier lokal barang dan jasa tersebut. Dengan mensubstitusikan permintaan untuk produksi barang eksternal dengan produksi barang lokal, masyarakat dapat meminjam modal untuk digunakan.²⁸

Ada beberapa manfaat positif yang diperoleh dari kebijakan substitusi impor, antara lain :

1. Mengurangi ketergantungan pada impor. Terutama untuk barang – barang kebutuhan pokok.
2. Memperkuat sektor industri. Pengembangan sektor industri diperlukan untuk memperkuat perekonomian. Salah satu jalan untuk mempercepat pembangunan industri adalah substitusi impor, dimana pemerintah memberikan fasilitas yang memperbesar minat dan kemampuan swasta untuk berinvestasi. Industri – industri yang dibangun berdasarkan kebijakan substitusi impor pada tahap awal umumnya adalah yang bersifat padat karya dan atau berteknologi rendah. Sebab industri tersebut relative sesuai dengan kualitas SDM di Negara berkembang.
3. Memperluas kesempatan kerja. Bertumbuhnya sektor industri juga dapat memperluas kesempatan kerja. Dengan demikian tenaga kerja

²⁸Imports www.umich.edu/~econdev/ diakses pada 29 maret 2016

yang melimpah disektor pertanian akan diserap oleh sektor industri tanpa mengurangi *output* sektor pertanian

Bagi Negara – Negara yang sedang berkembang, dimana Negara – Negara tersebut biasanya mengalami kesulitan dalam neraca pembayarannya, maka substitusi impor dimaksudkan untuk mengurangi atau menghemat penggunaan devisa. Devisa merupakan faktor yang langka dan sangat dibutuhkan di Negara – Negara yang sedang melakukan pembangunan ekonomi. Dalam hal impor Negara tersebut belum dapat menghasilkan sendiri secara cukup barang – barang capital atau barang – barang konsumsi pokok yang perlu dalam jangka pendek, selalu bertambah besar. Bila devisa yang tersedia terbatas, maka rencana – rencana pembangunan tidak dapat berjalan dengan baik. Substitusi impor tidak dimaksudkan untuk mengurangi total impor melainkan hanya untuk menghemat devisa, guna mengimpor barang – barang capital yang dihasilkan sendiri.

Substitusi impor sering timbul bila pemerintah suatu Negara berusaha memperbaiki neraca pembangunannya, baik dengan cara pembatasan impor (kuota) maupun tarif. Yang mengakibatkan berkurangnya barang – barang impor, sedangkan permintaan akan barang tersebut masih besar, sehingga mendorong pemerintah sendiri maupun wirausaha untuk menghasilkan barang – barang yang dibatasi impornya. Jadi timbulnya substitusi impor dalam bidang industry sebagai akibat kebijaksanaan pemerintah didalam usahanya memperbaiki neraca pembayaran yang defisit. Alasan lain dengan adanya substitusi impor ialah karena pemerintah memiliki tujuan untuk memajukan perkembangan kegiatan ekonomi didalam negeri. Untuk memajukan perekonomian dan mendorong timbulnya

industri – industri yang pokok di dalam negeri, Negara tersebut terpaksa menjalankan suatu politik proteksi dan memberikan berbagai fasilitas pada pengusaha – pengusaha swasta. Maka keuntungan yang diperoleh para pengusaha swasta dapat meningkat dan dapat mendorong kegiatan ekonomi lebih lanjut.

2.2.2 Industri Orientasi Ekspor

Melihat pengalaman yang kurang berhasil dengan strategi SI, badan – badan dunia (seperti IMF dan Bank Dunia) menganjurkan agar negara – negara berkembang menerapkan strategi Orientasi Ekspor. Sesuai dengan teori klasik mengenai perdagangan internasional, *outward-oriented strategy* ini melibatkan pembangunan sektor industri manufaktur sesuai dengan keunggulan komparatif yang dimiliki Negara bersangkutan. Dalam prakteknya, banyak Negara yang menerapkan strategi PE dengan menghilangkan beberapa rintangan terhadap ekspor.

Ada empat faktor yang dapat menjelaskan bahwa kebijakan Promosi Ekspor mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat dibandingkan kebijakan Substitusi Impor, yaitu : (1) Kaitan sektor pertanian dengan sektor industri, misalnya agroindustri yang berkembang karena berorientasi pada bahan baku pertanian. Dengan adanya kaitan ini, maka permintaan sektor industri terhadap sektor pertanian tetap dapat di pertahankan. (2) Skala ekonomi (*economies of scale*) dapat dicapai karena permintaan ekspor yang skalanya cukup besar, sehingga dapat diproduksi secara manufaktur/masal. (3) Meningkatnya persaingan atas prestasi perusahaan karena kuatnya persaingan pada pasar dunia, dan (4) Dampak kekurangan devisa atas pertumbuhan ekonomi dapat diatasi.

Agar strategi ini dapat diterapkan dengan baik maka ada beberapa syarat penting yang diberikan, yaitu :

1. Pasar harus menciptakan sinyal harga yang besar, yang sepenuhnya merefleksikan kelangkaan barang yang bersangkutan, baik di pasar output maupun di pasar input.
2. Tingkat proteksi dari impor harus rendah.
3. Nilai tukar mata uang harus realistis, sepenuhnya merefleksikan keterbatasan uang asing yang bersangkutan.
4. Lebih penting lagi, harus ada insentif untuk meningkatkan ekspor.

Menurut strategi ini, paling tidak kesempatan yang harus di berikan kepada industri – industri yang memproduksi untuk pasar dalam negeri dan industri – industri untuk pasar ekspor

Meskipun kebijakan promosi ekspor memberikan manfaat, namun juga ada beberapa kendala, diantaranya

1. Cepat jenuhnya pasar internasional

Cepat jenuhnya pasar internasional disebabkan oleh faktor permintaan dan penawaran. Dilihat dari sisi permintaan, apa yang di ekspor oleh NSB seperti pakaian, minuman olahan, barang – barang elektronik sederhana, bahkan kendaraan. Umumnya merupakan barang kebutuhan pokok bagi Negara maju. Sebagai barang kebutuhan pokok, elastisitas permintaannya (elastisitas harga dan elastisitas pendapatan) sangat rendah, sehingga pasarnya relative tetap.

2. Makin kuatnya kebijakan proteksi oleh Negara – Negara maju.

Sekalipun Negara – Negara maju memiliki keunggulan komparatif dalam produksi teknologi padat modal dan ilmu pengetahuan, mereka tetap melakukan proteksi terhadap industri – industri yang berteknologi sederhana.

2.3 Kebijakan Perdagangan Pemerintah RI

Sejak terbentuknya *World Trade Organization* (WTO) tahun 1995, perkembangan perdagangan dunia mengalami pertumbuhan sangat pesat. Jaringan produksi mendunia dan Cina muncul sebagai kekuatan produksi dan perdagangan yang menakjubkan. Perubahan pola perdagangan dunia ini ikut mempengaruhi kinerja perdagangan Indonesia.

Lingkungan perdagangan internasional yang berubah sangat cepat dimana kekuatan globalisasi perdagangan dan aliran modal sangat kuat, maka kebijakan yang ditempuh seyogyanya harus tetap memperhatikan kepentingan domestik. Keberhasilan reformasi dan deregulasi perdagangan sangat ditentukan oleh beberapa faktor antara lain penekanan pada ketatnya persaingan maupun pendekatan secara bertahap (*Gradual*).

Secara ringkas perkembangan kebijakan perdagangan Indonesia dapat dilihat pada Tabel 2.1, sebagai berikut :

Tabel 2.2

Perkembangan Kebijakan Perdagangan Indonesia

Periode	Kebijakan
1948 – 1966	Ekonomi nasionalis, nasionalis perusahaan Belanda
1967 – 1973	Sedikit liberalisasi perdagangan
1974 – 1981	Substitusi impor, booming komoditas primer dan minyak
1982 – sekarang	Liberalisasi perdagangan dan Orientasi ekspor

Sumber : Nurhemi, Kerjasama Perdagangan Internasional, 2007, diolah

Pada era pasca kemerdekaan tahun 1948 sampai dengan 1966 banyak dilakukan nasionalisasi asset – asset Belanda oleh Presiden Soekarno, perkembangan investasi dan perekonomian relatif belum sepenuhnya bagus, memasuki tahun 1967 sampai dengan 1974, periode ini banyak ditandai dengan perubahan orde maka terjadi perubahan perekonomian Indonesia lebih terbuka yang berorientasi pada perekonomian dan perdagangan bebas. Memasuki periode 1974 sampai dengan 1981, era ini ditandai dengan *booming* beberapa komoditas primer, seperti kayu, karet dan lain – lain serta komoditas minyak dan gas di Indonesia. Pada periode yang sama tahun 1982 sampai sekarang masih menerapkan perekonomian terbuka dan Liberalisasi perdagangan dengan senantiasa mengedepankan orientasi ekspor non migas.

2.3.1 Keunggulan Komparasi (*Comparative Advantage*)

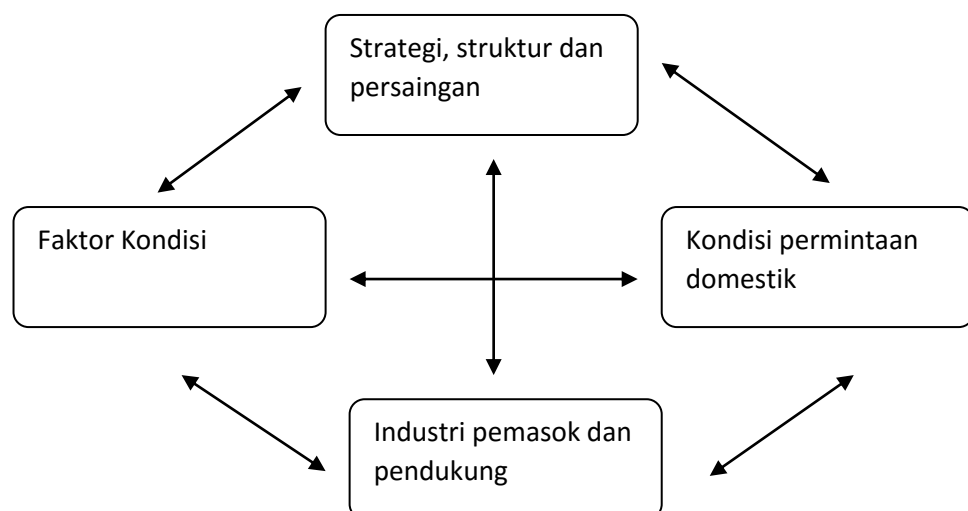
Michael Porter dalam bukunya *The Competitive advantage of Nations* (1998) mengembangkan sebuah model yang membantu kita menjawab pertanyaan mengapa sejumlah Negara lebih kompetitif dari pada Negara lain dan mengapa

sejumlah perusahaan yang berlokasi di Negara – Negara tertentu lebih kompetitif dari pada perusahaan Negara lain. Model ini menyatakan bahwa lokasi pusat kegiatan (*National Home Base*) perusahaan – perusahaan sangat berpengaruh terhadap daya kompetisi perusahaan – perusahaan tersebut di persaingan internasional. *Home Base* ini menyediakan faktor – faktor dasar yang dapat mendorong ataupun sebaliknya menghambat daya kompetisi perusahaan – perusahaan. Porter (1998) , membedakan empat faktor dasar :

1. Faktor Kondisi
2. Faktor Permintaan
3. Faktor Industri Pendukung, dan
4. Faktor strategi, struktur dan persaingan

Keempat faktor ini saling berkaitan dan secara visual seperti bentuk berlian (*diamond*) , sehingga dikenal dengan teori *diamond* , dan dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1



Sumber : Porter,1998

Faktor – faktor ini umumnya merupakan kondisi awal dan dasar yang dimiliki oleh suatu Negara. Negara tersebut dapat mengembangkan industri – industri tertentu dengan memanfaatkan kondisi dasar ini dengan optimal. Dalam kaitan ini, kita mengenal kemudian istilah Negara dengan biaya produksi rendah (*Low Cost Country*).

Faktor permintaan domestik adalah hal – hal yang terkait dengan permintaan terhadap barang dan jasa yang dihasilkan suatu Negara. Mereka berpengaruh terhadap kecepatan dan arah dari inovasi dan pengembangan produk.

Faktor industri pendukung adalah keberadaan atau pun ketiadaan industri – insdustri pemasok dan pendukung yang kompetitif dalam persaingan internasional. Industri pemasok yang kompetitif secara internasional akan memperkuat inovasi dan internasionalisasi industri utama pada fase perkembangan berikutnya. Industri pendukung adalah industri yang dapat memanfaatkan kegiatan bisnis secara bersama – sama dengan industri utama.

Faktor strategis, struktur dan persaingan perusahaan merujuk pada kondisi yang berpengaruh terhadap hal – hal yang terkait dengan bagaimana perusahaan – perusahaan di suatu Negara.

Teori *Diamond* dapat digunakan dalam berbagai tataran. Dalam tataran nasional, pemerintah dapat merumuskan strategi untuk memperkuat keunggulan komparatif Negara, yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan – perusahaan Nasional Negara tersebut dalam kancah persaingan internasional. Menurut Porter (1998), pemerintah bisa memperkuat keunggulan kompetitif dengan melakukan standarisasi kualitas produk nasional, menyusun baku mutu lingkungan dan

keuangan, serta mendorong kerjasama vertikal antara pemasok dan pembeli di pasar domestik

2.3.2 Tingkat Daya Saing Komoditi Ekspor

Tingkat daya saing komoditi ekspor suatu Negara atau industri dapat dianalisis dengan berbagai macam metode atau diukur dengan sejumlah indikator, salah satu diantaranya adalah *Reveald Comparative Advantage*, *Constant Market Share* dan *Real Effective Exchange Rate*. Disamping itu seperti halnya laporan tahunan dari *World Economic Forum* (WEF) mengenai *Global Competitiveness Index* dapat juga sebagai ukuran daya saing suatu Negara setiap tahunnya GCI adalah Index gabungan dari sejumlah indikator ekonomi yang telah teruji secara empiris memiliki korelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi (PDB) untuk jangka menengah dan panjang. Secara teoritis juga mengenai korelasi positif dengan kinerja atau tingkat daya saing ekspor. (tambunan, 2006).

Globalisasi pada dasarnya adalah fenomena yang mendorong perusahaan ditingkat mikro ekonomi untuk meningkatkan efisiensi agar mampu bersaing ditingkat lokal, nasional, regional, maupun internasional. Dengan globalisasi yang menyatukan pasar dan kompetisi investasi internasional meningkatkan tantangan sekaligus peluang bagi semua perusahaan baik kecil, menengah maupun besar.

Daya saing adalah kemampuan perusahaan, Industri, Daerah, Negara, atau antar daerah untuk menghasilkan faktor pendapatan dan faktor pekerjaan yang relatif tinggi dan berkesinambungan untuk menghadapi persaingan internasional. Oleh karena daya saing industri merupakan fenomena ditingkat mikro perusahaan

maka kebijakan pembangunan industri nasional didahului dengan mengkaji sektor industri secara utuh sebagai dasar pengukurannya. (OECD, 2007).

Untuk melihat lebih detail komoditas Indonesia yang bersaing dengan Negara – Negara lain di pasar dunia dapat diukur dari *Reavealed Comparaative Advantage* (RCA) masing – masing produk ekspor (balasa, 1965). Perhitungan RCA ini menggunakan data yang dikelompokkan dalam *Standard Industrial Trade Classification* (SITC) 2 digit. Nilai RCA yang lebih besar dari satu menunjukkan daya saing yang kuat. Semakin tinggi komoditi, maka semakin tangguh daya saing produk tersebut, sehingga disarankan untuk terus dikembangkan dengan melakukan spesialisasi pada komoditi tersebut.

Salah satu indikator yang dapat menunjukkan perubahan keunggulan komparatif adalah *RCA Index*. *Index* ini menunjukkan perbandingan antara pangsa ekspor komoditas atau sekelompok komoditas suatu Negara terhadap pangsa ekspor komoditas tersebut dari seluruh dunia. Dengan kata lain *Index* RCA menunjukkan keunggulan komparatif atau daya saing ekspor dari suatu Negara dalam suatu komoditas terhadap dunia.

Jika nilai *Index* RCA dari suatu Negara untuk komoditas tertentu lebih besar dari 1, berarti Negara yang bersangkutan mempunyai keunggulan komparatif di atas rata – rata dunia dalam komoditas tersebut. Sebaliknya, bila lebih kecil dari 1 berarti keunggulan komparatifnya untuk komoditas tersebut rendah atau di bawah rata – rata dunia.

2.3.3 Kebijakan Perdagangan Proteksionis

Salah satu kebijakan perdagangan proteksionis adalah untuk meningkatkan daya saing produk diluar negeri. Menurut pengatur kebijakan proteksionis, nilai tukar (*terms of trade*) barang manufaktur, yaitu ekspor utama Negara – Negara maju, sering dinilai lebih tinggi dari nilai tukar barang primer, yaitu ekspor utama Negara – Negara berkembang. Itulah yang menjadi alasan utama timbulnya kebijakan perdagangan proteksionis.

Ada beberapa alat kebijakan perdagangan proteksionis yang digunakan oleh hampir semua Negara. Beberapa diantaranya adalah tarif atau bea masuk, kuota, subsidi, dan larangan impor.

- a. Tarif atau bea masuk adalah pajak yang dikenakan terhadap barang yang diperdagangkan baik barang impor maupun ekspor.
- b. Kuota adalah batas maksimum jumlah barang tertentu yang bias diimpor dalam periode tertentu, biasanya satu tahun.
- c. Subsidi terhadap biaya produksi barang domestic akan menurunkan harga, sehingga produksi domestik dapat bersaing dengan barang impor.
- d. Larangan Impor, karena alasan – alasan tertentu, baik yang bersifat ekonomi maupun politik, suatu Negara melarang impor barang tertentu.

Walaupun Indonesia telah menganut sistem perdagangan bebas namun tetap ada beberapa komoditi strategis yang dilindungi, seperti beras dan daging sapi. Hal ini ditujukan untuk melindungi petani dan peternak dalam negeri, dengan cara membatasi kuota impor beras dan daging sapi yang di atur oleh pemerintah.